

**PENERAPAN ASAS *EQUALITY BEFORE THE LAW* DALAM
DISPARITAS *RATIO DECIDENDI* PUTUSAN PTUN TERKAIT
SENGKETA PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT**

SKRIPSI

Oleh:

Rizka Aulia Sani

NIM. 05010722021



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum

Surabaya

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizka Aulia Sani
NIM : 05010722021
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum
Judul : Penerapan Asas *Equality Before the Law* dalam disparitas *ratio decidendi* Putusan PTUN Terkait Sengketa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 18 November 2025

Yang menyatakan,



Rizka Aulia Sani
NIM. 05010722021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Rizka Aulia Sani

NIM : 05010722021

Judul : Penerapan Asas *Equality Before the Law* dalam disparitas *ratio decidendi* Putusan PTUN Terkait Sengketa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang munaqasah skripsi.

Surabaya, 18 November 2025

Pembimbing,



Elva Imeldatur Rohmah, M.H.

NIP. 199204022020122018

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Rizka Aulia Sani

NIM. : 05010722021

Judul : Penerapan Asas *Equality Before the Law* dalam Disparitas *Ratio Decidendi* Putusan PTUN terkait Sengketa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Selasa, tanggal 16 Desember 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Elva Imeldatur Rohmah, M.H.

NIP. 199204022020122018

Penguji II

Prof. Dr. Hj. Titik Triwulan Tutik, M.H.

NIP. 196803292000032001

Penguji III

H. Ikhsan Fatah Yasin, S.H.I., M.H.

NIP. 198905172015031006

Penguji IV

M. Pasca Zakky Muhajir Ridlwan

S.H., M.Kn

NIP. 199205142025051001

Surabaya, 16 Desember 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Drs. H. Husein Yah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Rizka Aulia Sani
NIM : 05010722021
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Hukum/Hukum
E-mail address : auliasanirizka@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Penerapan Asas *Equality Before the Law* dalam Disparitas *Ratio Decidendi* Putusan PTUN Terkait

Sengketa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 29 Januari 2026

Penulis



(Rizka Aulia Sani)

ABSTRAK

Skripsi ini dilatar belakangi karena adanya perbedaan *ratio decidendi* hakim dalam memberikan putusan di PTUN terkait penjatuhan sanksi PTDH terhadap anggota polri yang diduga melakukan perselingkuhan dengan istri rekan polri. Inkonsistensi putusan tersebut dipengaruhi oleh dominasi diskresi pejabat administrasi, perbedaan penilaian terhadap tingkat kesalahan pelanggaran disiplin, penerapan asas *equality before the law* yang masih bersifat formalistik, serta minimnya pengujian AUPB secara substantif.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dengan menganalisis putusan PTUN terkait objek penelitian, pendekatan perundang-undangan untuk menelaah dasar hukum sengketa PTDH seperti Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan, Kekuasaan Kehakiman dan Peradilan Tata Usaha Negara, pendekatan konseptual untuk mengkaji prinsip-prinsip hukum seperti asas *equality before the law* dan *ratio decidendi* serta pendekatan komparatif untuk membandingkan disparitas putusan PTUN. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan analisis data menggunakan metode interpretasi gramatikal.

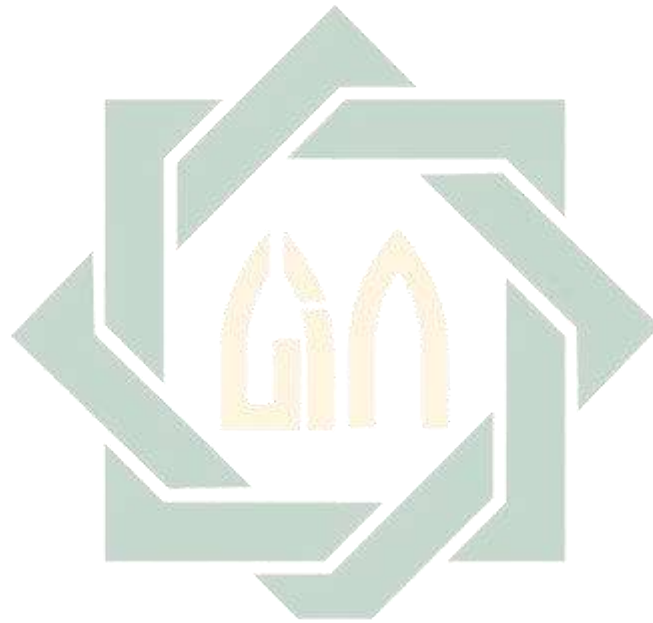
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan asas *equality before the law* dalam sengketa PTDH di PTUN berlandaskan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 yang menjamin persamaan kedudukan dan kepastian hukum. Asas ini diwujudkan atau diterapkan melalui pengujian KTUN dengan AUPB sebagai tolak ukur yang diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2014, yakni kepastian hukum dan kemanfaatan.

Inkonsistensi penafsiran hakim dalam Putusan Nomor 12/G/2021/PTUN.GTO dan Putusan Nomor 64/G/2023/PTUN.SMG menunjukkan belum terwujudnya asas *equality before the law* di lingkungan PTUN meskipun kedua perkara memiliki kesamaan substansial. Disparitas putusan ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta asas kepastian hukum dan kecermatan dalam AUPB UU Nomor 30 Tahun 2014. Sejalan dengan pemikiran H.L.A. Hart dan Mardjono Reksodiputro, kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi melanggar prinsip keadilan substantif.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan penerapan asas *equality before the law* dalam PTUN belum diterapkan secara konsisten. Hal tersebut tercermin dalam disparitas *ratio decidendi* terhadap perkara yang memiliki fakta dan dasar hukum yang sama, sehingga melanggar asas *equality before the law*. Peneliti menyarankan penerapan asas *equality before the law* secara konsisten melalui penyamaan pemahaman pengambil keputusan serta perumusan pedoman dan menetapkan tolak ukur yang objektif agar penegakan hukum berjalan adil dan seragam.

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Putusan PTUN tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat.....	7
---	---



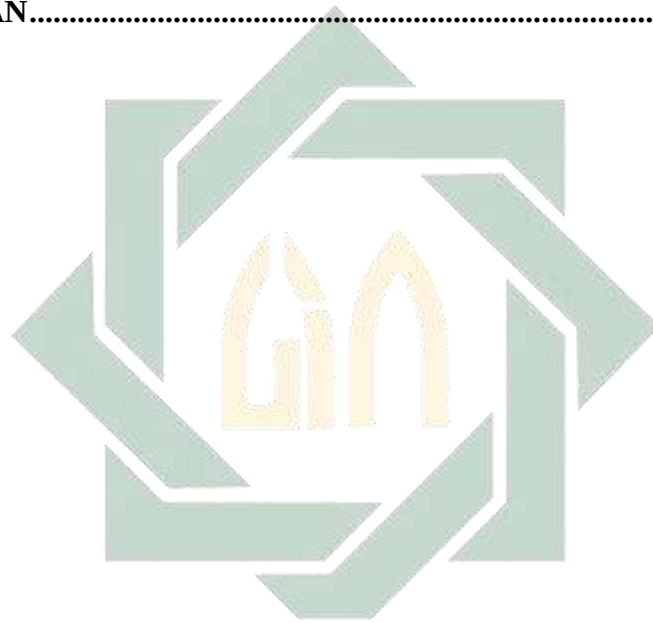
UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	11
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Tujuan Penelitian.....	12
E. Manfaat Penelitian.....	13
F. Penelitian Terdahulu.....	14
G. Landasan Teori	18
H. Definisi Oprasional.....	30
I. Metode Penelitian.....	32
J. Sistematika Pembahasan.....	37
BAB II TEORI TERKAIT PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT	42
A. Teori Negara Hukum	42
1. Pengertian dan Perkembangan Konsep Negara Hukum.....	42
2. Prinsip-Prinsip Negara Hukum Menurut Para Ahli	44
3. Penerapan Konsep Negara Hukum di Indonesia.....	47
4. Perlindungan Hak Asasi Manusia	49
B. Teori <i>Equality Before the Law</i>	52
1. Pengertian Prinsip <i>Equality Before the Law</i>	52
2. Asas <i>Equality Before the Law</i> dalam Sistem Hukum Indonesia.....	58

C. Teori Kepastian Hukum.....	61
1. Konsep Kepastian Hukum.....	61
2. Asas Kepastian Hukum dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara.....	65
D. <i>Ratio Decidendi</i> Hakim	68
1. Pengertian <i>Ratio Decidendi</i> Hakim.....	68
2. Dasar Hukum <i>Ratio Decidendi</i> Hakim.....	70
E. Kewenangan Diskresi	74
1. Konsep Diskresi dalam Hukum Administrasi Negara	74
2. Pengaturan Hukum Kewenangan Diskresi.....	77
3. Batasan dan Pengawasan Terhadap Diskresi Pejabat Pemerintahan	81
F. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.....	84
1. Pengertian Asas Umum Pemerintahan yang Baik.....	84
2. Fungsi dan Arti penting Asas Umum Pemerintahan yang Baik.....	88
G. Teori Keadilan Substantif.....	90
1. Konsep Keadilan Substantif	90
2. Keadilan Substantif dalam <i>Ratio Decidendi</i> Hakim	92
BAB III PENGATURAN HUKUM PENERAPAN ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW TERKAIT SENGKETA PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DALAM PERADILAN TATA USAHA NEGARA....	98
A. Pengaturan Hukum dan Konsep Asas <i>Equality Before the Law</i> dalam Peradilan Tata Usaha Negara	98
B. <i>Equality Before the Law</i> dan Disparitas <i>Ratio Decidendi</i> dalam Putusan PTUH menurut ahli	104
C. <i>Ratio Decidendi</i> dan Amar Putusan Hakim dalam Disparitas Putusan Peradilan Tata Usaha Negara	112
1. Putusan Nomor 12/G/2021/PTUN.GTO	112
2. Putusan Nomor 64/G/2023/PTUN.SMG.....	121
D. Penerapan Asas <i>Equality Before the Law</i> dalam Putusan PTUN.....	128
BAB IV PENERAPAN ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW TERHADAP DISPARITAS RATIO DECIDENDI PUTUSAN PTUN TERKAIT SENGKETA PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT.....	131
A. Disparitas Putusan Peradilan Tata Usaha Negara terkait sengketa pemberhentian tidak dengan hormat.....	131

B. Penerapan Asas <i>Equality Before the Law</i> terhadap disparitas putusan Peradilan Tata Usaha Negara terkait Pemberhentian Tidak Dengan Hormat	141
BAB V PENUTUP.....	148
A. Kesimpulan.....	148
B. Saran.....	149
DAFTAR PUSTAKA.....	150
LAMPIRAN.....	158



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Mukhyi, Mohammad, Metodologi Penelitian Panduan Praktis Penelitian Yang Efektif (PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023)
- Arto, Mukti, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)
- Asikin, Zainal, Mengenal Filsafat Hukum (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2014), pp. 46–47
- Asshiddiqie, Jimly, Gagasan Negara Hukum Indonesia, 2002
- , Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta (Konstitusi Press, 2005)
- Azhary, Negara Hukum Indonesia (UI-Press, 1995)
- Brian A. Garner (ed), *Black's Law Dictionary Ninth Edition* (West Publishing, 2009)
- Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2025
- Diantha, I Made Pasek, Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Prenada Media Group, 2016)
- Fathurrahman, Keadilan Dalam Perspektif Psikologi (Pustaka Pelajar, 2001)
- Hamzah, Ali, KUHP Dan KUHAP (Jakarta: Rineka Cipta, 1996)
- HR, Ridwan, Hukum Administrasi Negara (Rajawali Pers, 2014)
- Hutabarat, Ramly, Persamaan Di Hadapan Hukum (*Equality Before The Law*) Di Indonesia (Jakarta: Ghalia Indonesia), (1985)
- Ibrahim, Johnny, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Bayumedia Publishing, 2005)
- Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum (Prenada Media Group, 2016)
- , Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Kencana, 2008)
- MD, Mahfud, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi (Rajawali Press, 2012)
- Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum (Liberty Yogyakarta, 2007)
- Mujiburohman, Dian Aries, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (Yogyakarta: STPN Press, 2022)
- Muhadi, P. M. H., Hukum Administrasi Dan *Good Governance*, Universitas Trisakti., 2010

- Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram University Press, 2020)
- Putro, Widodo Dwi, Filsafat Hukum: Pergulatan Filsafat Barat, Filsafat Timur, Filsafat Islam, Pemikiran Hukum Indonesia Hingga Metajuridika Di Metaverse (Jakarta: Kencana, 2024)
- Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum (PT Citra Aditya Bakti, 2000)
- Rahmat Muhajir Nugroho, Setiadi, Agus, Paradigma Keadilan Substantif Dalam Perumusan Norma Baru (CV. Global Press, 2018)
- , Ilmu Hukum, in Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012
- Ramelan, Hukum Acara Pidana: : Teori Dan Implementasi (Sumber Ilmu Jaya, 2006)
- Sembiring, Tamaulina Br., Irmawati, Muhammad Sabir, and Indra Tjahyadi, Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori Dan Praktik) (CV Saba Jaya Publisher, 2023)
- Shidarta, Penerapan Aspek Filosofis, Yuridis, Dan Sosiologis Dalam Pertimbangan Putusan Hakim (Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2024)
- Sholehudin, Umar, Hukum & Keadilan Masyarakat (Malang: Setara Press, 2011),
- Sibuea, Hotma P., Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Penerbit Erlangga, 2010)
- Sinamo, Nomensen, Hukum Administrasi Negara (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010)
- Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum (Universitas Indonesia, 2014)
- Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011)
- Sukiati, Metodologi Penelitian: Sebuah Pengantar, Medan: CV. Manhaji, 2016
- Titik Triwulan Tutik, Ismu Gunadi Widodo, Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia (Jakarta: Prenada Media Group, 2011)
- , *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia*, (Depok: Prenamedia Group, 2017)
- Wrbka, Mark Fenwick dan Stefan, *The Shifting Meaning of Legal Certainty* (Singapore: Springer, 2016)

Jurnal

- Aditya Afieq Prakoso, Roy Marthen Moonti, and Ibrahim Ahmad, *Dissenting Opinion* Dan Asas Legalitas Dalam Pemberhentian Anggota Polri, 2.9 (2025)
- Akbar Zulkarnain, Evi Deliana, Zulwisman, Politik Hukum Pembentukan Peradilan

Tata Usaha Militer Dalam Perspektif Negara Hukum, 11.9.A (2025)

Amri, Ahmad Ihsan, and Bayu Dwi Anggono, Implementasi Perbandingan Asas *Equality Before The Law* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Dengan Negara Lain', *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, 6.1 (2024)

Anisa Fitri, M. Ikhwanul Huda, 'Penyelesaian Sengketa Mudharabah Perspektif Keadilan John Rawls', *Jurnal At-Tamwil Kajian Ekonomi Syariah*, 07.01 (2025)

Arif, Mhd. Fakhurrahman, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik', *Jurnal Hukum Tata Negara*, 6.2 (2023)

Aulia, Ardiansyah, Gilang Rizky Ramadhan, Muhammad Fauzi, Stiven Doorson, Yosaphat Diaz, and Farahdinny Siswajanthi, 'Penerapan Dan Pengaturan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Hukum Acara Perdata', *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2.1 (2024)

Aulia, Keysha Nashwa, 'Kepastian Hukum Dan Keadilan Hukum Dalam Pandangan Ilmu Komunikasi', *Jurnal Sains Student Research*, 2.1 (2024)

Beny Yunianto, Tomy Michael, Keberlakuan Asas *Equality Before The Law* Bagi Pejabat Pelaksana Kebijakan Penanganan Covid-19, *Mimbar Keadilan*, (2021)

Collins, Paul M., 'The Consistency of Judicial Choice', *The Journal of Politics* 70, 3, (2008)

Fachreza, Ade, 'Meluruskan Pemahaman "Konsistensi Putusan" Untuk Mencapai Kesatuan Hukum', *A Review of Consistency in Sentencing*, (2021)

Febrian Chandra, Muhammad Azri, Rizki Apriadi Bahri dan Tiara Ananda, 'Pembuktian Pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) Sebagai Dasar Gugatan Di PTUN', *Jurnal Ilmiah Hukum*, 3.2 (2025)

Fitriana, Ika, 'Perlindungan Terhadap Hak-Hak Kelompok Minoritas Di Indonesia Dalam Mewujudkan *Equality Before the Law*', *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan*, 6.2 (2021)

Foran, Michael, 'The Cornerstone Of Our Law: Equality, Consistency And Judicial Review', *The Cambridge Law Journal* 81, 2, (2022)

Fuad, Ontran Sumantri Riyanto, 'Perspektif Hak Asasi Manusia Terhadap Penahanan Ijazah Asli Dalam Perjanjian Kerja Oleh Perusahaan', *Juris Humanity : Jurnal Riset Dan Kajian Hukum HAM*, (2023)

Giri Ahmad Taufik, Dan, and Muhammad Pasha Nur Fauzan, 'Konsistensi Putusan Dalam Rangka Mendorong Badan Peradilan Yang Agung Dan Berintegritas', in *Penegakan Dan Penguatan Integritas Pengadilan (Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia*, 2023)

Hadi, Fikri, 'Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia', *Wijaya Putra*

Law Review, 1.2 (2022)

Hadi, Nanang Faisol, and Nur Kholik Afandi, '*Literature Review Is A Part of Research*', *Sultra Educational Journal*, 1.3 (2021)

Harahap Syahnan, M, '*Perbedaan Konsepsi Rechtstaat Dan the Rule of Law*', *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 5.1 (2014)

Himawan, Mohammad Hilmi, Saartje Sarah Alfons, and Renny Heronia Nendissa, '*Ratio Decidendi Terhadap Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pada Perkara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Aparatur Sipil Negara Terpidana Korupsi*', *PATTIMURA Legal Journal*, 1.1 (2022)

Istiqamah, Hikmah, Siti Zainab, Yanlua Muhammad, and Akbar Yanlua, '*Konsep Negara Hukum Rechtsstaat Dan Rule Of Law*', *Jurnal Hukum Dan Pemikiran Islam*, 3.1 (2024)

Joni Sandri Ritonga, Rahma Fitri Amelia Hasibuan, Annisa Putri Sinaga, M. Fazli Pratama, Vressilia Witama, Faiz Putra Ramadhan Lubis, Nadilah Andini, '*Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Putusan Peradilan Tata Usaha Negara*', *Case Law : Journal of Law*, 6.1 (2025)

Julista, Mustamu, '*Diskresi Dan Tanggungjawab Administrasi Pemerintahan*', *Jurnal Sasi*, 17.2 (2011)

Kolo, Maria Odilia, '*Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dan Pelaku Kejahatan Berdasarkan Asas Equality Before the Law*', *Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 2.2 (2024)

Lubis, Fauziah, Dyna Varissa Indah, Nabilah Putri Ayuni, and Nuur Zayana Purba, '*Kajian Asas-Asas Equality Before The Law Dalam Praktik Peradilan Perdata*', *Innovative : Journal Of Social Science Research*, 5.3 (2025),

Luthfi, Muhammad Khaerul, '*Pertanggungjawaban Atas Penggunaan Diskresi Oleh Pejabat Pemerintah Dari Sudut Pandang Hukum Administrasi Negara*', *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 1.4 (2024)

Maulidin, Iskandar A Gani, Efendi, '*Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Anggota Polri*', *Jurnal Suara Hukum*, 5.1 (2023)

Moody Rizqy Syailendra, Austin Prayogo, Feili Lim, '*Efektivitas Putusan PTUN Dalam Mengoreksi Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintahan*', *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 4.1 (2025)

Nasution, Faisal Akbar, '*Hak Imunitas Anggota DPR RI Sebagai Pejabat Publik Dalam Hal Menjalankan Tugas Dan Wewenangnya*', *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8.2 (2021)

Nugroho, Indra Bayu, '*Aktualisasi AAUPB Dalam Legislasi: Studi Relasional Politik Hukum Dan Kebijakan Publik*', *Echt Studiosum Law Review*, 3.2 (2024)

- Pelokilla, Jerimas, 'UUD 1945 Sebagai Landasan Konstitusional Terhadap Perlindungan Hak Warga Negara Indonesia', 1.1 (2023)
- Pratiwi, Dianita, Dini Aprilita, Fenia Brilianti, Lutfia Qisti Awal, and Siti Lutfiati, 'Bentuk - Bentuk Diskriminasi Pada Siswa Kelas VI UPT SDN 2 Blitarejo', Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 1.3 (2024)
- Putra, Dhaffa Hosya, 'Analisis Hubungan Antara Asas *Equality Before the Law* Dan Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Penegak Hukum', Kodifikasi : Jurnal Penelitian Islam, Vol 15, No. 01 (2021), 15.01 (2021)
- Raja, Andreas Bintang, Irfan Hakim, Giovano Allan, Radityo Wirananto, and Almer Fathoni, 'Analisis Yuridis Terhadap Peran PTUN Dalam Menjamin Kepastian Hukum Bagi Warga Negara', Jurnal Hukum, Humaniora Dan Politik, 5.5 (2025)
- Ramadhan, Setyo Rahmat, 'Rekonstruksi Asas *Equality Before The Law* Dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin', Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum, 10.2 (2021)
- Ravizki, Ajeng Althafira Alkansa dan Eka Nanda, 'Disparitas *Ratio Decidendi* Atas Status Objek Sengketa Yang Sama Dalam Perkara Perdata Dan Pidana', Jurnal Hukum Lex Generalis, 6.7 (2025)
- Safitri, E. D., Sa'adah, 'Penerapan Upaya Administratif Dalam Sengketa Tata Usaha Negara', Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 3.1 (2021)
- Saputra, Dadin E., 'Hubungan Antara *Equality Before The Law* Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia Dengan Harmonisasi Konflik Antar Lembaga Penegak Hukum', Jurnal Hukum Dan Pemikiran, 15.1 (2015)
- Saputra, Rahmat, 'Konsep Penerapan Diskresi Inovatif Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat', Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara, 2.1 (2024)
- Sarah Adinda Putri, Agus Triono, and Kasmawat, 'Diskresi Pejabat Administrasi Dalam Pelayanan Publik Terhadap Batasan Dan Pengawasan Diskresi', Jurnal Ilmu Hukum, 4.1 (2025)
- Siregar, Barry Franky, 'Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Pengedar Narkotika Di Kota Yogyakarta', *E-Journal UAJY*, (2016)
- Siti Halilah, Mhd Fakhurrahman Arif, 'Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli', Siyasa: Jurnal Hukum Tata Negara 4, No.2, (2021)
- Sitorus, Grece Celina, Romauli Panjaitan, Reynold Simanjuntak, and Henry Noch Lumenta, 'Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Materil, Dan Batas Kewenangan Pejabat', Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan, 9.1 (2025)
- Syamsudin, M., 'Keadilan Prosedural Dan Substantif Dalam Putusan Sengketa

Tanah Magersari Kajian Putusan Nomor 74/PDT.G/2009/PN.YK', Jurnal Yudisial, 7.1 (2014)

Tagung, Melkiardo Febrian, Mohammad Afrizal, and Nuruz Zaman, 'Analisis Praktik Penetapan Objek Sengketa Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Proses Penyelesaian Perkara', Jurnal Medua Akademik, 3.11 (2025)

Wahid, Abdul, 'Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif?', Jurnal Ius Constituendum, 7.2 (2022)

Skripsi

Darojad, Muslichan, 'Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Praperadilan (Studi Putusan No. 11/Praper/2016/PN.SBY)', (Tesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022)

Faried, Achmad, 'Penerapan Asas Kepastian Hukum Pada Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 (Studi Kajian Keputusan Bupati Simeulue Nomor 888/14/2019)', (Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2022)

Habibi, Mochamad Ainul Huri al, 'Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pemberhentian Bupati Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 128/K/Tun/2017', (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018)

Pratama, Ilham Yuman, 'Pencantuman Pidana Tutupan Sebagai Pidana Pokok Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Nasional Dihubungkan Dengan Asas *Equality Before The Law*', Skripsi, Universitas Pasundan Bandung, 2023

Ramadhan, Dimas Hamas, 'Pemulihan Hak Pegawai Negeri Sipil Akibat Pembatalan Keputusan Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara', (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, 2024), 2024

S, Riko Subandrio, 'Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dan Pelaku Kejahatan Yang Di Dasarkan Atas Asas *Equality Before The Law* (Studi Putusan Nomor 753/Pid. Sus/2023/PN Mdn)', (Skripsi, Universitas HKBP Nommensen, 2024)

Santoso, Andre Abadi, 'Kontruksi Kesengajaan Sebagai Dasar Tindak Pidana Pembunuhan Pada Bagian Organ Tubuh Vital (Studi Kasus Yuriprudensi Mahkamah Agung 692K/PID/2015' (Skripsi, Universitas Narotama, 2023)

Suciana, Aprilia Silvi, 'Analisis Yuridis Putusan Lepas Oleh Hakim Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN.Sby)', (Skripsi, Universitas Nasional, 2023)

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara'

Putusan Pengadilan

Putusan Tata Usaha Negara Gorontalo Tingkat Pertama Dalam Wahyu Ibrahim v. Kapolda Gorontalo, Nomor12/G/2021/PTUN.GTO, Tanggal 6 September 2021, 88, 2021

Putusan Tata Usaha Negara Semarang Tingkat Pertama Dalam Randi Yulianto v. Kapolda Jawa Tengah, Nomor64/G/2023/PTUN.SMG, Tanggal 19 September 2023

Media Elektronik

Bahri, Idik Seful, 'Mengenal Perbedaan Ratio Decidendi Dan Obiter Dicta Dalam Putusan Hakim', MARI News, 2025 <<https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/mengenal-perbedaan-ratio-decidendi-dan-obiter-dicta-03q>> [accessed 23 December 2025]

Khuluq, M. Khusnul, 'Keadilan Substansial Dan Tantangannya Dalam Sistem Hukum Positif', MARI News <<https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/keadilan-substansial-dan-tantangannya-dalam-sistem-hukum-0qQ>> [accessed 23 December 2025]

Negara Hukum: Makna, Prinsip, Dan Penerapannya Di Indonesia, KPU KAB-MAMBERAMOTENGAH <https://kab-mamberamotengah.kpu.go.id/blog/read/8470_negara-hukum-makna-prinsip-dan-penerapannya-di-indonesia> [accessed 1 January 2026].

Rahmatul'ula, Syukrian, 'Apa Itu Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)?', ILS Law Firm <<https://www.ilslawfirm.co.id/asas-asas-umum-pemerintahan-yang-baik/>> [accessed 21 December 2025]

‘Tugas Pokok Dan Fungsi Peradilan’, Mahkamah Agung Republik Indonesia
<<https://www.mahkamahagung.go.id/id>> [accessed 23 December 2025]



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A